

LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)

Tahun Sidang : 2019-2020
Masa Persidangan : IV
Rapat ke- : 16
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, dan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kepala Badan Restorasi Gambut
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Senin, 13 Juli 2020
Waktu : 10.30 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
Acara : Membahas:
1. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
2. Pencegahan *Illegal Logging*;
3. Pencegahan Perambahan Kawasan Hutan;
4. Pencegahan Perburuan Satwa Liar; dan
5. Pengendalian Konflik Satwa Liar.
Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP)
Sekretaris Rapat : Drs. Budi Kuntaryo (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
Hadir : A. 43 Anggota dari 55 Anggota Komisi IV DPR RI

B. Hadir:

1. Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M. (Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
2. Ir. Wiratno, M.Sc. (Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
3. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
4. Helmi Basalamah, M.M. (Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan); dan
5. Ir. Nazir Foad, M.Sc. (Kepala Badan Restorasi Gambut).

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, dan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kepala Badan Restorasi Gambut, membahas Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Pencegahan *Illegal Logging*, Pencegahan Perambahan Kawasan Hutan, Pencegahan Perburuan Satwa Liar, dan Pengendalian Konflik Satwa Liar dibuka pukul 10.30 WIB oleh Ketua Rapat, Sudin, S.E. dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Badan Restorasi Gambut terkait pelaksanaan tugas pokok menjaga dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup serta mengelola dan melestarikan hutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan penelaahan atas relevansi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup, terutama dalam pasal dan/atau penjelasan pasal terkait izin pembakaran lahan untuk kegiatan pembukaan lahan, terhadap kriteria kearifan lokal.

3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan kawasan konservasi Taman Nasional Tesso Nilo di Kabupaten Pelelawan Provinsi Riau. Dalam hal ini, Komisi IV DPR RI meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menindak tegas para pelaku usaha perkebunan yang melakukan tindak pidana perambahan kawasan hutan. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI mendorong agar masyarakat di dalam kawasan hutan dapat diberikan akses pengelolaan hutan di kawasan konservasi, melalui skema Kemitraan Konservasi.
4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk terus meningkatkan koordinasi internal antar Eselon I, yaitu antara Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, serta Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam melaksanakan program Konservasi Keanekaragaman Hayati dalam rangka pencegahan perburuan tumbuhan dan satwa liar dilindungi serta pengendalian konflik satwa liar yang terjadi di areal Hutan Lindung dan Hutan Produksi termasuk areal konsesi HTI, HPH, dan Restorasi Ekosistem serta Areal Penggunaan Lain.
5. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk terus meningkatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan, terutama pemberian akses pengelolaan hutan oleh masyarakat di dalam dan di luar kawasan hutan dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat dalam kegiatan pengamanan hutan, dalam rangka pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pencegahan *illegal logging* dan perambahan kawasan hutan, serta pencegahan dan pengendalian perburuan tumbuhan dan satwa liar serta konflik satwa liar.
6. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan penyusunan Rancangan Undang-Undang yang khusus mengatur hal-hal terkait Sumber Daya Genetik (SDG), dimana diharapkan peraturan perundang-undangan dimaksud dapat dijadikan dasar untuk pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengelolaan SDG, yang menjadi salah satu aset penting negara dan merupakan bukti kedaulatan bangsa dan negara.

7. Komisi IV DPR RI akan melaksanakan Rapat Kerja dengan Menteri Pertahanan, Menteri Pertanian, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Menteri BUMN untuk membahas Rencana Pengembangan Lahan Pangan Nasional (*food estate*) di Provinsi Kalimantan Tengah.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.10 WIB.

Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,

Ttd.

Sudin, S.E.

A-151

Direktur Jenderal
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup & Kehutanan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Ttd.

Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M.

Direktur Jenderal
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Ttd.

Ir. Wiratno, M.Sc.

Kepala Badan Restorasi Gambut,

Ttd.

Ir. Nazir Foead, M.Sc.

Direktur Jenderal
Pengendalian Perubahan Iklim
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Ttd.

Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc.

Kepala Badan
Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Ttd.

Helmi Basalamah, M.M.